

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua akan diuraikan mengenai landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang melandasi kerangka pemikiran dalam mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Setelah itu membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan tentang model dan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

2.1.1 *Grand Theory*

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan *Pro-Poor* (*Pro-Poor Growth Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah Teori Pertumbuhan *Pro-Poor* (*Pro-Poor Growth Theory*) dalam kerangka ekonomi pembangunan, dimana teori ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia apabila bersifat inklusif, yaitu mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara simultan (Klasen, 2010). Ravallion dan Chen (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dikatakan *pro-poor* apabila manfaatnya secara proporsional lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi, dengan mengukur elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan yang menunjukkan seberapa sensitif tingkat kemiskinan terhadap perubahan pendapatan rata-rata.

elanjutnya, Fosu (2017) menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan melemahkan kualitas pembangunan manusia, sehingga diperlukan kebijakan redistribusi dan investasi modal manusia yang memadai. Dalam konteks pembangunan manusia, Sen (2017) melalui *Capability Approach* menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi ekspansi kebebasan dan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (Todaro & Smith, 2020). Dollar et al. (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan kombinasi antara penciptaan lapangan kerja di sektor produktif dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, sementara penelitian Ianchovichina dan Lundstrom (2019) menunjukkan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan inklusif mencapai peningkatan IPM yang lebih cepat karena manfaat pertumbuhan terdistribusi lebih merata ke seluruh segmen masyarakat.

Dengan demikian, Teori Pertumbuhan *Pro-Poor* memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan

pembangunan manusia secara terukur dan *representative*. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Konsep pembangunan manusia adalah pembangunan yang dilakukan mengutamakan pada pembangunan sumber daya manusia yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna meningkatkan daya serap dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah (Mahroji, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia adalah komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013). Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi mendasar. Dimensi tersebut meliputi kesehatan yang baik dan umur panjang; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur

dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selain itu, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan kombinasi indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dalam dimensi mengukur kehidupan yang layak, indikator daya beli masyarakat digunakan untuk beberapa kebutuhan pokok makanan dan non makanan, yang dapat dilihat pada besaran rata-rata pengeluaran perkapita, sebagai alat pendapatan yang mewakili pembangunan untuk mencapai kehidupan yang layak (BPS, 2023).

2.1.2.2 Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, *Human Development Report* 1993: 105)

1. Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortalityrate.

2. Indeks Pendidikan (*Educational Achievement*)

Diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (the mean years of schooling).

3. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to resource*)

Dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

2.1.2.3 Pengukuran Indeks Manusia

Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yakni:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir, tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{3}$$

Keterangan:

X_1 = indeks harapan hidup

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

2.1.2.4 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa teori dalam pertumbuhan indeks pembangunan manusia regional, seperti:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara menuju kondisi yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Proses ini juga dapat dijelaskan sebagai peningkatan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi, perbandingan pendapatan nasional dari berbagai tahun perlu dilakukan. Dalam konsepnya, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses di mana kapasitas produksi perekonomian meningkat seiring berjalannya waktu, yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar (Todaro, 2006). Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah perjalanan menuju peningkatan kemampuan produksi suatu perekonomian dengan tujuan mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

2. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan Adam Smith, aset utama dalam kegiatan produksi masyarakat adalah sumber daya alam. Jumlah sumber daya alam yang tersedia di suatu daerah dianggap sebagai "batas maksimum" bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Saat sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, penentu utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut adalah jumlah penduduk dan stok modal di daerah

tersebut. Perannya sumber daya manusia dalam proses pertumbuhan output dianggap bersifat pasif. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, hal ini dapat mengurangi tingkat aktivitas ekonomi karena produktivitas tiap individu cenderung menurun. Pada saat kondisi tersebut terjadi, kemakmuran masyarakat akan mengalami penurunan.

2.1.2.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.3 Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Senewe et al., 2021), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Amarta dalam (Wulandari & Rachmawati, 2021) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak

mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

2.1.4.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2024: 54) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan tersebut menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran *Head Count Index*.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Todaro (2020) kemiskinan dapat dibedakan menurut menurut sifatnya yang terdiri atas:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang esensial untuk menjalani kehidupan. Penilaian kemiskinan ini dilakukan dengan mempertimbangkan

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas umum atau kebutuhan pokok tersebut

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar. Di samping itu, kemiskinan dibagi dalam dua kategori yaitu:

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung karena sistem lembaga yang mencakup tidak hanya organisasi tetapi juga peraturan yang ditetapkan. Kemiskinan struktural menciptakan situasi di mana sebagian anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sumber daya ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia.

4. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan alam, penggunaan teknologi yang kurang maju, dan dampak bencana alam. Dalam kondisi di mana sumber daya manusia dan alam memiliki kualitas yang rendah atau terbatas, peluang produksi menjadi terbatas atau tingkat efisiensi produksi menjadi rendah.

2.1.4.4 Penyebab Kemiskinan

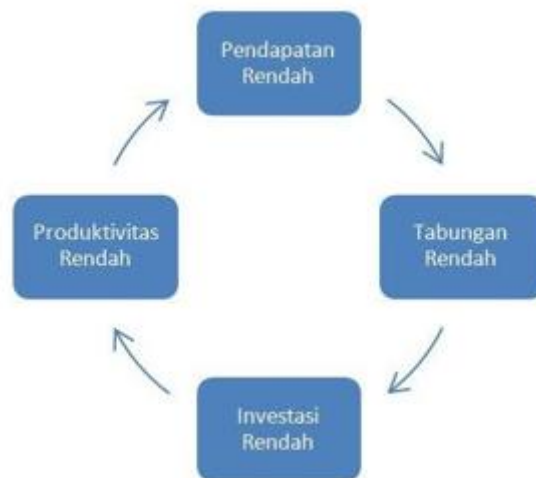
Masalah kemiskinan yang terjadi antar suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural (politik), dan lain-lain. Kemiskinan identik

dengan negara yang sedang berkembang, dimana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju.

Sharp dalam (Abdul Aziz et al., 2016) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Sumber: (Abdul Aziz et al., 2016)

Gambar 2. 1 Lingkaran Kemiskinan Versi Nurske

2.1.4.5 Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Malthus

Teori ini mengatakan terjadinya kemiskinan kronis merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara. Pertumbuhan penduduk akan meningkat dengan pesat dan cepat menurut deret ukur, sementara dengan proses bertambahnya hasil yang berkurang dari jumlah yang tetap pada faktor produksi seperti tanah, maka ketersediaan pangan meningkat menurut deret hitung.

2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Nurske, yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga menyebabkan produktivitas rendah.

3. Teori Paradigma Neo-Liberal

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu, bukan kelompok, yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya.

4. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan struktural, bukan individu, yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan.

2.1.3.4 Teori Hubungan Kemiskinan dengan IPM

Teori Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty Theory*) memandang kemiskinan bukan semata-mata sebagai akibat dari kelemahan individu, melainkan sebagai kondisi yang terbentuk oleh struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak adil. Dalam perspektif ini, kemiskinan muncul akibat keterbatasan akses kelompok masyarakat tertentu terhadap sumber daya produktif, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak (Todaro & Smith, 2020). Struktur ekonomi yang timpang, rendahnya kualitas institusi publik, serta ketidakseimbangan distribusi sumber daya menyebabkan masyarakat miskin terjebak dalam kondisi kemiskinan yang bersifat persisten.

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan struktural berperan sebagai faktor penghambat utama pencapaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan struktural cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, serta daya beli yang lemah, sehingga berdampak langsung pada rendahnya nilai IPM. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia mempersempit peluang ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat kemiskinan itu sendiri.

Dengan demikian, Teori Kemiskinan Struktural menegaskan bahwa tingginya tingkat kemiskinan akan menekan capaian IPM secara keseluruhan, bukan hanya melalui keterbatasan pendapatan, tetapi juga melalui hambatan sistemik yang membatasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM memerlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perbaikan struktur sosial dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai maju atau tidak suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi suatu barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur

dengan menggunakan data produk domestik regional bruto dari barang akhir dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian biasanya selama satu tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan juga memperlihatkan struktur perekonomian regional.

Sedangkan Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu mulai dari kesediaan sumber daya alam, sumber daya non ekonomi didalamnya termasuk sistem ekonomi, faktor sosial budaya dan kebijakan pemerintah (Junaidin Zakaria, 2020).

2.1.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:
 - a. Adam Smith berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi.

- b. David Ricardo berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan.
 - c. Thomas Robert Malthus berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup tidak berkecukupan.
2. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dikemukakan oleh beberapa ahli tetapi lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
- a. David Ricardo berpendapat tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga modal dan output yang dihasilkan.
 - b. Schumpeter berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
 - c. Teori Harrod-Domar berpendapat perlunya pembentukan modal (investasi) sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan teguh.

2.1.4.3 Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB). Data yang digunakan adalah data sekunder dari badan pusat statistik. Produk domestik regional bruto merupakan indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian daerah pada suatu periode tertentu, baik

dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi dapat menentukan bagaimana kemampuan dari pemerintah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Maka dari itu, banyak pemerintah di berbagai negara yang selalu berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Hal ini dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk membantu rakyatnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (Sihite, 2022).

$$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$$

Dimana:

r = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke – t (nominal)

$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke $t-1$ (nominal)

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan secara triwulan dan tahunan. Agar pengumpulan data yang dihasilkan tepat waktu, jika pertumbuhan ekonomi bernilai positif artinya perekonomian tumbuh. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif artinya perekonomian akan mengalami kontraksi, kontraksi yang berturut-turut akan terjadi resesi. Produk domestik regional bruto (PDRB) bisa dihitung dari tiga pendekatan yaitu melalui lapangan usaha, pengeluaran, dan pendapatan.

2.1.4.4 Teori Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup (Mankiw, 2019). Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 2020). Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat dua arah, dimana pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya untuk investasi sosial, sementara pembangunan manusia menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif yang mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Namun, Jones dan Klenow (2016) dalam studinya menggunakan data lintas negara menemukan bahwa PDB per kapita hanya menjelaskan sebagian dari variasi kesejahteraan antar negara, dan faktor-faktor seperti harapan hidup, waktu luang, dan ketimpangan konsumsi memberikan kontribusi signifikan terhadap perbedaan kesejahteraan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup tanpa disertai perbaikan dalam dimensi pembangunan manusia lainnya.

Dalam perspektif pembangunan, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai prasyarat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika perekonomian tumbuh, pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk

membiayai sektor pendidikan dan kesehatan, sementara masyarakat memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih stabil. Kondisi ini secara teoritis akan mendorong peningkatan dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap IPM.

Namun demikian, teori pembangunan modern menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis meningkatkan IPM apabila tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dan kebijakan yang inklusif. Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu berpotensi meningkatkan ketimpangan dan membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan itu sendiri, apakah bersifat inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

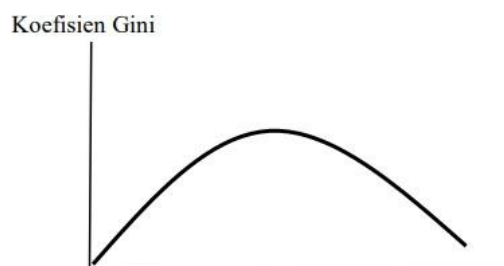
2.1.5.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi di dalam masyarakat (Piketty, 2020). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik (*backwash effects*) dan lemahnya dampak sebar (*spread effects*) di negara-negara berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang telah memiliki keunggulan kompetitif (Myrdal dalam Todaro & Smith, 2020).

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografi, kualitas infrastruktur, dan akses terhadap modal yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda dan menciptakan fenomena daerah maju dan daerah terbelakang (Iammarino et al., 2019). Menurut Todaro dan Smith (2020), distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat, dimana terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan yaitu konsep ketimpangan absolut yang menggunakan parameter dengan nilai mutlak seperti perbedaan pendapatan dalam satuan mata uang, dan konsep ketimpangan relatif yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan seperti koefisien Gini dan rasio Palma (Atkinson & Bourguignon, 2015).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya hipotesis "U-terbalik" atau Kurva Kuznets yang dikemukakan oleh Simon Kuznets tahun 1955, dimana Kuznets menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata karena konsentrasi pertumbuhan di sektor modern, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata melalui mekanisme *trickle-down effect* dan perluasan akses terhadap pendidikan serta lapangan kerja (Kuznets, 2019). Namun, penelitian kontemporer oleh Milanovic

(2016) menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets tidak selalu berlaku universal, terutama di era globalisasi dimana ketimpangan cenderung meningkat kembali di banyak negara maju dan berkembang akibat konsentrasi modal, teknologi yang skill-biased, dan lemahnya kebijakan redistribusi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pemerataan pendapatan (Alvaredo et al., 2018).



Sumber: Kuznet dalam Alvaredo et al., 2018

Gambar 2. 2 Kurva Kuznet

Pada gambar 2.2 dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara menurut Todaro dalam (Mugabe et al., 2018)

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan

pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relative lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.

2.1.5.2 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

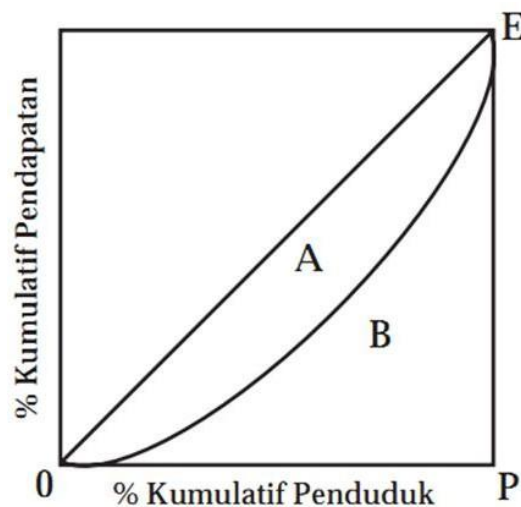
1. Size Distribution

Secara umum ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya.

- a. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- c. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.



Sumber: (Al & Subrata, 2018)

Gambar 2. 3 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata (Al & Subrata, 2018).

3. Gini Rasio

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antar diagonal, kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai antara nol hingga satu.

Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini meliputi:

- a. jumlah rumah tangga atau penduduk
- b. rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke -i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

4. Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (*Word Bank*)

Klarifikasi Ketimpangan	Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Ketimpangan Tinggi	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan
Ketimpangan Sedang	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan
Ketimpangan Rendah	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan

Sumber: World Bank

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.

2.1.5.3 Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris (2021) dalam mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yakni:

1. Tingginya pertambahan penduduk yang akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita
2. Inflasi yaitu pertambahan pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Banyaknya investasi dalam proyek padat modal (*capital intensive*).

Sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah.

5. Mobilitas sosial masyarakat yang rendah
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negaranegara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berembang dalam perdagangan dengan negara maju.
8. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain akan hancur.

2.1.5.4 Teori Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan IPM

Menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup (Mankiw, 2019). Peningkatan pendapatan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang merupakan komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 2020). Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan serta memperluas kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas (Todaro & Smith, 2020). Namun, teori pembangunan modern menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis meningkatkan IPM apabila tidak disertai pemerataan pendapatan dan kebijakan yang inklusif, karena pertumbuhan yang timpang dapat memperbesar ketimpangan dan membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap layanan dasar (Sen, 2017). Oleh karena itu, pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap IPM sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dimana diperlukan kebijakan *pro-poor* seperti investasi modal manusia, perlindungan sosial, akses universal terhadap layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja produktif untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Hanushek & Woessmann, 2020).

2.1.6 Kriminalitas

2.1.6.1 Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan merupakan permasalahan umum yang sering terjadi dalam Masyarakat di berbagai tempat, baik secara bersamaan maupun dalam rentang waktu yang berbeda. Menurut Abdulsyani (2017) Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, Soesilo (2018) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dengan undang-undang.

Kejahatan merupakan elemen integral dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya kejahatan dikarenakan adanya ketidakseimbangan perilaku di dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dari luar. Hal ini menyebabkan anggota masyarakat cenderung menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, terutama di lingkungan sosial yang memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku kejahatan. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang

menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

2.1.6.2 Teori – Teori Kriminalitas

Karl Max berpendapat bahwa kriminalitas muncul merupakan salah satu produk dan sistem ekonomi kapitalis. Mary dalam (Mardhatillah et al., 2023) meneliti penelitian selama dengan menggunakan data statistika pada tahun 1836-1861, yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kenaikan harga gandum dengan peningkatan Kriminalitas (Boeger, 2020). Backer (2018) merupakan salah satu pelopor yang melakukan kajian tentang kriminalitas dari pendekatan Ilmu Ekonomi. Dalam melakukan analisis, Becker melakukan pendekatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh para ekonomi terdahulu terhadap setiap permasalahan sosial yang ada. Dapat diasumsikan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan, jika apabila ekspektasi utilitas (*expacted utility*) melebihi utilitas (*utility*) yang diperoleh dan jika seseorang menggunakan waktu dan sumber data yang ada untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Beberapa orang akan menjadi Kriminal, bukan karena Motivasi dasar, tetapi karena perhitungan dan manfaat biaya yang akan di keluarkan (*benefit and cost*) (Backer, 2018).

Backer (2018) mengembangkan model fungsi untuk menggambarkan persamaan ekspektasi dari tindakan kriminalitas yang ada, ada pun sebagai berikut:

$$EU_j = p_j U_j(Y_j - f_j) + (1p_j)U_j(Y_j)$$

Penjelasanya dimana:

EU_j = Expected Utility tindakan kriminalitas;

p_j = Probabilitas tindakan kriminalitas ditangkap;

U_j = Fungsi utilitas

Y_j = Pendapatan yang diperoleh dari tindakan kriminalitas;

F_j = Interpretasi sejumlah uang yang setara dengan hukuman.

Persamaan diatas menggambarkan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan kriminalitas yang ada mempunyai dua probabilitas yaitu probabilitas tindakan kriminalitas tertangkap (p_j) dan probabilitas tindakan kriminalitas yang tidak tertangkap ($1-p_j$). Jika tindakan yang tertangkap, maka utilitas yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas yaitu merupakan fungsi dari pendapatan yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas (Y_j). Jika tertangkap, maka utilitas yang akan didapatkan dari tindakan kriminalitas dikurangi dengan sejumlah interpretasi sejumlah uang yang setara dengan jumlah hukuman (Y_j-f_j). Oleh karena itu, expected utility dari tindakan kriminalitas merupakan penjumlahan dari probabilitas tindakan kriminalitas yang ada, yaitu merupakan tindakan kriminalitas yang tertangkap dengan probabilitas tindakan kriminalitas jika tidak tertangkap, sebagai persamaannya.

2.1.6.3 Faktor Penyebab Kriminalitas

Menurut Kansil (2014), Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketanagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

1. Kemiskinan, kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.
2. Pengangguran, besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas.
3. Jumlah Penduduk, salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk.
4. Pendidikan, bahwa tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.
5. Moral, tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum.

2.1.6.4 Indikator Kriminalitas

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengukur angka kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Angka Jumlah Kejahatan (*Crime Total*)

Pengukuran Indeks Kejahatan (It) Indeks kejahatan yaitu persentase kenaikan atau penurunan kejadian kejahatan selama setahun dibandingkan terhadap satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar).

2. Selang Waktu Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan (*Crime Clock*)

Selang Waktu Kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik.

3. Jumlah Orang Yang Berisiko Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Angka kejahatan (umumnya per 100.000 orang penduduk) dengan cara perhitungan jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan selama setahun dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut dikalikan 100.000.

Pengukuran Indeks Kejahatan (*It*) yaitu jumlah kenaikan atau penurunan kejadian kejahatan selama setahun dibandingkan terhadap satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar). Adapun rumus menentukan indeks kejahatan adalah sebagai berikut:

$$it = \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Keterangan:

t_0 = Tahun Dasar

t = Tahun t

2.1.6.5 Teori Hubungan Tingakt Kriminalitas dengan IPM

Teori *Social Disorganization* yang dikemukakan oleh Shaw dan McKay (1942) menjelaskan bahwa tingginya tingkat kriminalitas merupakan cerminan dari lemahnya struktur sosial dalam suatu komunitas. Ketidakstabilan sosial yang ditandai dengan kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan meningkatnya kejahatan, yang pada gilirannya mengganggu

proses pembangunan manusia. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kriminalitas yang tinggi berdampak negatif melalui terciptanya lingkungan yang tidak aman, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan serta menurunkan produktivitas ekonomi.

Kriminalitas juga menurunkan kualitas hidup masyarakat karena menciptakan rasa takut, mengurangi aktivitas ekonomi, serta menghambat investasi publik dan swasta di sektor-sektor strategis pembangunan manusia. Kondisi ini memperkuat siklus disorganisasi sosial, di mana rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan mempersempit peluang ekonomi, yang selanjutnya meningkatkan risiko kriminalitas. Dampak ini menjadi semakin signifikan di wilayah perkotaan dengan tingkat kemiskinan struktural dan kepadatan penduduk tinggi, seperti di Pulau Jawa.

Dengan demikian, berdasarkan Teori *Social Disorganization*, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas memiliki pengaruh negatif terhadap IPM, karena melemahkan fondasi sosial, ekonomi, dan institusional yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1.	Resce, G. (2021). <i>Wealth-adjusted Human Development Index</i> .	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Pendapatan	Variabel Kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas Objek Penelitian di North America, the Middle East & North Africa	Hasil Penelitian menunjukkan pendapatan berpengaruh terhadap index pembangunan manusia	<i>Journal of Cleaner Production</i> , 318 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128587
2.	Palamim, C. V. C., Boschiero, M. N., Valencise, F. E., & Marson, F. A. L. (2022). <i>Human Development Index Is Associated with COVID-19 Case Fatality Rate in Brazil: An Ecological Study</i> .	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Pendapatan dan tingkat kemiskinan	Variabel pengangguran dan kriminalitas Objek Penelitian di Brazil	Hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu: tingkat pendapatan dan kemiskinan memengaruhi index pembangunan manusia	<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , 19(9). https://doi.org/10.3390/ijerph19095306
3.	Dasic, B., Devic, Z., Denic, N., Zlatkovic, D., Ilic, I. D., Cao. (2020). <i>Human development index in a context of human development: Review on the western Balkans countries</i>	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: pengangguran dan tingkat kemiskinan	Variabel pendapatan dan kriminalitas Objek Penelitian di Review on the western Balkans countries	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di negara – negara Balkan Barat	<i>Brain and Behavior</i> , 10(9). https://doi.org/10.1002/brb3.1755

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
4.	Lapian, A. L. C. P., Walewangko, E. N., Mandei, D., & Yapanto, L. M. (2023). <i>The Effect of Government Expenditure on Education and Health on Human Development Index in Boven Digoel District.</i>	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: tingkat kemiskinan	Variabel pendapatan, pengangguran dan kriminalitas Objek Penelitian di <i>Boven Digoel District.</i>	Studi ini menunjukkan bahwa Belanja pemerintah pada sektor kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<i>Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities</i> , 6(4), 294–300.
5.	Khan, N. H., Ju, Y., & Hassan, S. T. (2019). <i>Investigating The Determinants Of Human Development Index In Pakistan.</i>	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan	Variabel pengangguran dan kriminalitas Objek Penelitian di <i>Pakistan.</i>	Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia	<i>Environmental Science and Pollution Research</i> , 26(19), 19294–19304. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05271-2
6.	Simarmata, Y. P. H., & Sinaga, M. (2023). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Pendapatan, pengangguran dan Tingkat Kemiskinan	Variabel kriminalitas Objek Penelitian di Manusia di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.	<i>LWSA Conference Series</i> , 06, 104–106. Retrieved from https://talentconferenceseries.usu.ac.id/lwsa

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan	Hasil	Sumber
7.	Ardelia, A. S. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kalimantan Barat.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kriminalitas	Variabel Pendapatan, pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Objek Penelitian di Kalimantan Barat.	Hasil analisis menunjukan indeks pembungan manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap kriminalitas	<i>Jurnal Muamalat Indonesia - JMI</i> , 3(1). https://doi.org/10.26418/jmi.v3i1.64075
8.	Septi Yanti Masrika Nindri, & Vietha Devia S.S. (2023). Hubungan Variabel Makroekonomi dan Tingkat Kriminalitas di Indonesia.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kriminalitas, kemiskinan, pengangguran	Variabel Pendapatan, Objek Penelitian di Indonesia.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tingkat kriminalitas	<i>NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam</i> , 20(2), 163–180. https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i2.10383 .
9.	Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Tingkat Pengangguran, Pendapatan	Variabel Kriminalitas dan Tingkat Kemiskinan .	Investasi, Indeks Pembangunan Manusia serta Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak pada Ketimpangan Distribusi Pendapatan.	<i>EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi</i> , 2(2), 436–445. https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1586

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan	Hasil	Sumber
10.	Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jateng.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kemiskinan	Variabel Pendapatan, pengangguran dan Kriminalitas Objek Penelitian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017	<i>Media Komunikasi Geografi</i> , 23(1), 12–24. https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301
11.	Putri, N. M., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Indeks Pengangguran	Variabel Pendapatan, kemiskinan dan Kriminalitas Objek Penelitian di Kabupaten Bojonegoro.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2020	<i>Equity: Jurnal Ekonomi</i> , 10(1), 59–71. https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.83
12.	Zahira, S. N., Rahyu, A. R., & Fajri, F. N. (2022). Pengaruh UMR, Kemiskinan, dan Realisasi DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kemiskinan, Pendapatan	Variabel, pengangguran dan Kriminalitas Objek Penelitian di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum regional dan indeks kedalaman kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang	<i>Jurnal STEI Ekonomi</i> , 31(01), 102–111. https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517
13.	Sania, L., Balafif, M., &	Variabel Dependen:	Variabel, kemiskinan	Upah Minimum Regional	<i>Bharanomics</i> , 2 (1), 33–46.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.	Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan, Pendapatan	dan Kriminalitas Objek Penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.	berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189
14.	Admaja, & Hasmarini. (2023). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Harapan Hidup, Lama Sekolah dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kemiskinan, Pendapatan	Variabel, pengangguran dan Kriminalitas Objek Penelitian di provinsi lampung tahun 2019-2020.	upah minimum regional dan tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<i>Jurnal Disrupsi Bisnis</i> , 6(1), 126. https://doi.org/10.32493/drj.v6i1.26217
15	Kiha, & Seran, (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Belu.	Variabel Dependen: Index Pembangunan Manusia (IPM) Independen: Kemiskinan, Pengangguran	Variabel, pendapatan dan Kriminalitas Objek Penelitian di Kabupaten Belu.	Hasil dari analisis variabel jumlah penduduk (X1), pengangguran (X2) dan kemiskinan (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 0,766 yang artinya bahwa antara mempunyai hubungan yang kuat,	<i>Innovative Marketing</i> , 19(2), 17–26. https://doi.org/10.21511/im.19(2).2023.02

2.2 Kerangka Pemikiran

Sudah merupakan ketentuan umum bilamana pemecahan suatu masalah diperlukan suatu landasan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel yakni seperti berikut:

2.2.1 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan kekayaan suatu negara. Menurut Kuncoro dalam (Kristin et al., 2022) yang menjadi fokus utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia. Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Disamping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2024)

Beberapa riset telah banyak membuktikan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya: penelitian (Sofilda et al., 2023) menunjukkan bahwa IPM

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua (Sofilda, 2024). Begitu juga dengan penelitian (Silswanto, 2025), bahwa IPM sangat berperan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Walaupun ada beberapa riset yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan dinyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara IPM dan kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 1990-2013 (Susilowati dan Wahyudi, 2025).

2.2.2 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan IPM. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka (Barro, 1991).

Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersifat kompleks dan tidak selalu linier. Menurut (Todaro dan Smith, 2020), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap IPM. Namun, penelitian oleh (Barro, 2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga manfaatnya tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan temuan (Pritchett, 2021) yang mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus,

pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata dan akses terhadap layanan dasar masih terbatas. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan IPM, efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas

2.2.3 Hubungan Keimpangan Pendapatan dengan Indeks Pembangunan

Manusia

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Septiani et al., 2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Becker dalam (Solihin, 2025) yang menerangkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dan semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan Teori Human Capital yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yosi, et.al., 2023) bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Kriminalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia

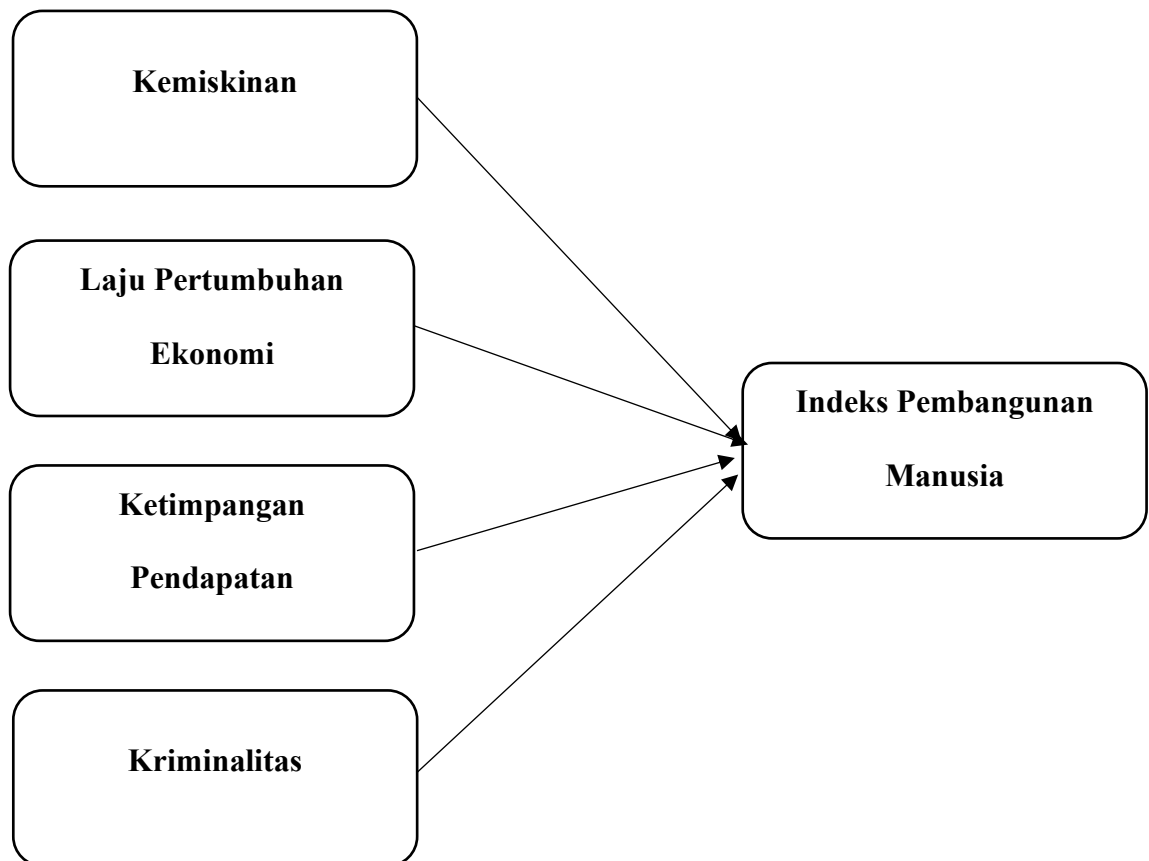
Dalam penelitian terdahulu, IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat kejahatan. Peningkatan IPM menjadi penanda bahwa telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membantu seseorang dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta pendapatan yang tinggi. Ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka kesejahteraan seseorang juga akan meningkat dikarenakan semua kebutuhannya telah terpenuhi sehingga berdampak pada penurunan tindakan kriminalitas sebab tuntutan hidup seseorang menjadi berkurang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia, 2023) menyatakan bahwa. Pengaruh antara IPM terhadap tingkat kriminalitas menunjukkan pengaruh negatif signifikan yang artinya semakin tinggi IPM maka tingkat kriminalitas semakin rendah begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, 2021) bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilham, 2023; Sofia, 2023; Marko, 2023) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup yang layak semestinya Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi mampu menurunkan angka Kriminalitas

suatu wilayah, namun faktanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masih tidak mampu menurunkan angka kriminalitas di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jamaliah, 2022), menyatakan hasil kejahatan menunjukkan hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia, artinya jika IPM turun 1 satuan maka korupsi akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas berpengaruh negatif, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Diduga secara bersama-sama kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).